

Peran Penduduk, Aktivitas Ekonomi, Dan Transportasi Terhadap Pengembangan Wilayah: Studi Kasus Di Pulau Raas, Kabupaten Sumenep

Jinani Firdausi¹, Muftihatul Khaira², Debby³

Program Studi Ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid

Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penduduk, aktivitas ekonomi, dan transportasi laut dalam mendukung pengembangan wilayah Pulau Raas, Kabupaten Sumenep. Pulau Raas memiliki potensi sumber daya laut yang besar dan posisi strategis dalam jalur pelayaran antarpulau, namun pengembangannya masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada kualitas sumber daya manusia, aktivitas ekonomi yang masih berbasis sektor primer, serta keterbatasan aksesibilitas transportasi laut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara ringan dengan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk Pulau Raas berperan penting sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi, terutama di sektor perikanan dan perdagangan tradisional, namun kontribusinya terhadap pengembangan wilayah belum optimal akibat rendahnya nilai tambah ekonomi dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Transportasi laut menjadi faktor kunci dalam menentukan kelancaran distribusi barang dan mobilitas penduduk, tetapi masih terkendala oleh frekuensi kapal, fasilitas pelabuhan, dan kondisi cuaca. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran penduduk, diversifikasi aktivitas ekonomi, serta peningkatan sistem transportasi laut yang terintegrasi merupakan langkah strategis untuk mendorong pengembangan wilayah Pulau Raas secara berkelanjutan.

Keywords Penduduk, kegiatan ekonomi, transportasi laut, pengembangan wilayah, Pulau Raas.

Pendahuluan

Pulau Raas merupakan salah satu pulau kecil yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, dengan potensi sumber daya laut dan ekonomi lokal yang sangat menjanjikan. Secara geografis, Pulau Raas menempati posisi strategis pada jalur pelayaran antar pulau di Kawasan Madura dan sekitarnya, sehingga memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas ekonomi wilayah kepulauan. Namun, meskipun memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam yang melimpah, pertumbuhan wilayah Pulau Raas masih belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan sarana transportasi laut, infrastruktur pendukung, serta belum meratanya pembangunan wilayah kepulauan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Sumenep, Kecamatan Raas memiliki jumlah penduduk sekitar 43.418 jiwa, dengan komposisi penduduk yang sebagian besar bergantung hidup pada sektor perikanan dan perdagangan tradisional. Besarnya jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa Pulau Raas memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal apabila didukung oleh sistem distribusi dan transportasi yang memadai. Secara administratif, Kecamatan Raas terdiri atas 9 desa, yaitu Desa Ketupat, Jungkat, Karopoh, Karangnangka, Alasmalang, Poteran, Brakas, Tonduk, dan Guwa Guwa. Keberadaan desa-desa tersebut mencerminkan adanya pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang tersebar di wilayah kepulauan, dengan karakteristik ekonomi yang didominasi

oleh usaha perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, serta perdagangan skala kecil.

Menurut Nasiruddin dan Zakiah (2024), mayoritas penduduk Pulau Raas bekerja pada sektor perikanan dan perdagangan tradisional. Namun demikian, aktivitas ekonomi Masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, terutama terbatasnya akses pasar. Frekuensi kapal penyeberangan yang tidak menentu serta tingginya biaya logistik menyebabkan distribusi hasil tangkapan laut dan produk lokal ke wilayah lain menjadi tidak efisien. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya daya saing produk lokal serta terbatasnya peningkatan pendapatan masyarakat.

Permasalahan serupa juga ditemukan di wilayah kepulauan lain di Indonesia, seperti Kepulauan Riau, di mana transportasi laut berperan sebagai faktor kunci dalam menghubungkan antar pulau dan menggerakkan perekonomian masyarakat (Kusnita et al., 2021). Tanpa system transportasi laut yang efektif, terjangkau, dan berkelanjutan, potensi ekonomi wilayah kepulauan sulit berkembang secara optimal. Oleh karena itu, Pulau Raas memerlukan pengelolaan transportasi laut yang terintegrasi guna memperkuat konektivitas, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis peran penduduk, aktivitas ekonomi, dan transportasi laut dalam mendukung pengembangan wilayah Pulau Raas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pembangunan wilayah kepulauan yang berorientasi pada peningkatan konektivitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan dalam konteks ekonomi dan sosial memiliki beragam definisi yang berkembang seiring waktu. Menurut Todaro dan Smith (2020), pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan institusional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sen (1999) memperluas definisi ini dengan menekankan pembangunan sebagai perluasan

kebebasan manusia dalam memilih dan mengaktualisasikan potensi dirinya. Sachs (2015) juga menyatakan bahwa pembangunan sejati tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks nasional, Lestari, Pasha, dan Mahardika (2021) menggarisbawahi bahwa pembangunan Indonesia pada era modern bergerak dari fokus pada pertumbuhan ekonomi makro menuju kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan (Lestari et al., 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, tidak hanya dalam dimensi ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan lingkungan.

Konsep wilayah dalam pembangunan erat kaitannya dengan ruang ekonomi yang memiliki karakteristik dan potensi berbeda-beda. Sjafrizal (2014) menyebut wilayah sebagai kesatuan geografis yang memiliki batas administratif dan fungsional dengan interaksi ekonomi di dalamnya. Wilayah dapat dikategorikan menjadi homogen, nodal, dan perencanaan (planning region), tergantung pada karakter dan fungsi spasialnya. Karakteristik ekonomi regional sendiri mencakup potensi sumber daya alam, tenaga kerja, infrastruktur, serta pola interaksi antarwilayah seperti perdagangan, migrasi, dan investasi (Kuncoro, 2021). Di Indonesia, kondisi geografis yang luas menyebabkan setiap wilayah memiliki struktur ekonomi yang berbeda: Jawa lebih industri dan jasa, sedangkan luar Jawa masih dominan pada pertanian dan sumber daya alam. Adryawning dan Widiyanto (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah masih menjadi masalah utama pembangunan nasional karena pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Pulau Jawa (Adryawning & Widiyanto, 2025).

Dalam kerangka teori pembangunan wilayah, Hirschman (1958) dan Myrdal (1957) memperkenalkan teori pertumbuhan tidak seimbang (unbalanced growth theory). Hirschman berpendapat bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara

merata di semua sektor dan wilayah sekaligus, melainkan dimulai dari sektor atau wilayah unggulan yang kemudian menimbulkan efek sebar (spread effect) ke daerah lain. Sebaliknya, Myrdal memperingatkan adanya efek hisap (backwash effect), di mana daerah maju menarik sumber daya dari daerah tertinggal, memperlebar kesenjangan antarwilayah. Prinsip kesetimbangan pembangunan antarwilayah karenanya menuntut intervensi kebijakan yang mampu memperkuat konektivitas dan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi. Studi empiris terbaru di Indonesia oleh Pratama dan Yuliana (2023) juga mendukung pandangan ini, bahwa pembangunan berbasis pusat pertumbuhan tanpa strategi pemerataan dapat memperburuk ketimpangan ekonomi regional (Pratama & Yuliana, 2023).

Secara historis, pendekatan pembangunan di Indonesia bermula dari pendekatan sektoral yang bersifat top-down dan terpusat pada pemerintah nasional. Pendekatan ini didasarkan pada prioritas pembangunan ekonomi tertentu—seperti industri, pertanian, atau infrastruktur—yang diharapkan meneteskan manfaat ke daerah-daerah (trickle-down effect). Namun, Asriadi, Harahap, dan Nawawi (2024) menyatakan bahwa model sektoral seperti ini kurang efektif dalam mengatasi ketimpangan karena minimnya partisipasi daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan (Asriadi et al., 2024). Dalam praktiknya, pendekatan sektoral sering kali gagal mengakomodasi keunikan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga berdampak pada ketidakefisienan pembangunan dan lemahnya daya saing daerah.

Sebagai reaksi terhadap kelemahan tersebut, lahirlah pendekatan pembangunan regional yang menekankan keterkaitan antarwilayah (spatial linkage) dan peran wilayah sebagai entitas ekonomi yang saling terhubung. Pendekatan ini menganggap pembangunan sebagai proses terintegrasi antara sektor dan ruang. Penelitian oleh Rahmawati (2023) menegaskan bahwa pembangunan regional di Indonesia diarahkan pada penguatan koridor ekonomi dan konektivitas antarwilayah sebagai strategi untuk menekan ketimpangan pembangunan nasional

(Rahmawati, 2023). Dengan demikian, pembangunan regional tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat industri, tetapi juga memperkuat hubungan fungsional antara pusat dan hinterland.

Dalam konteks desentralisasi, berkembang pula paradigma pembangunan lokal yang menekankan prinsip bottom-up dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini berpijak pada gagasan bahwa pembangunan akan lebih efektif apabila digerakkan dari tingkat lokal berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi lokal (local economic development) menekankan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya lokal. Studi oleh Yusnita dan Wibowo (2022) menemukan bahwa pembangunan berbasis potensi lokal di Indonesia berhasil meningkatkan ketahanan ekonomi desa dan menciptakan inovasi sosial yang lebih adaptif (Yusnita & Wibowo, 2022). Oleh karena itu, dalam kerangka pembangunan wilayah yang modern, pembangunan sektoral, regional, dan lokal harus dipandang sebagai pendekatan yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan, agar tercapai pemerataan dan keberlanjutan pembangunan di seluruh daerah.

Metode penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran penduduk, aktivitas ekonomi, dan transportasi laut dalam pengembangan wilayah Pulau Raas, Kabupaten Sumenep. Data diperoleh melalui: 1. Studi pustaka, dengan menelaah buku, jurnal, dan artikel terkait pembangunan wilayah, ekonomi lokal, dan transportasi laut. 2. Observasi lapangan dilakukan secara langsung untuk mengamati kegiatan ekonomi, aktivitas nelayan, dan operasional transportasi laut di Pulau Raas. 3. Wawancara ringan dengan warga lokal, seperti nelayan dan pedagang, untuk memperoleh informasi terkait penghasilan, pola distribusi hasil laut, serta kendala yang mereka hadapi dalam transportasi laut dan aktivitas ekonomi.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles & Huberman (1994), melalui tiga

tahap: a. Reduksi data, yaitu memilah informasi penting dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. b. Penyajian data, yaitu menyusun informasi secara sistematis sehingga pola hubungan antara penduduk, aktivitas ekonomi, dan transportasi laut dapat terlihat. c. Penarikan kesimpulan, untuk memahami pengaruh ketiga aspek tersebut terhadap pengembangan wilayah Pulau Raas. 4. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menggabungkan teori dari literatur dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga hasilnya relevan dan mencerminkan situasi ekonomi serta transportasi di Pulau Raas.

Pembahasan dan Hasil

Kepulauan Raas merupakan salah satu kecamatan kepulauan yang berada di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kecamatan Raas terletak pada koordinat sekitar 7° LS dan 114° BT, serta dikelilingi oleh Selat Madura di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah selatan, Selat Kangean di sebelah timur, dan Selat Sepudi di sebelah barat. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kecamatan Raas memiliki karakter wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada sektor kelautan dan transportasi laut. Luas wilayah Kecamatan Raas mencapai sekitar 38,9 km² dengan jumlah penduduk sebesar 34.784 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sekitar 894 jiwa/km². Secara administratif, Kecamatan Raas terdiri dari 9 desa, yaitu Desa Ketupat, Jungkat, Karopoh, Karangnangka, Alasmalang, Poteran, Brakas, Tonduk, dan Guwa Guwa. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas sosial dan ekonomi yang relatif intens untuk ukuran wilayah kepulauan.

Dari sisi sosial ekonomi, sebagian besar penduduk Kecamatan Raas berada pada usia produktif dan bekerja di sektor primer, terutama perikanan, pertanian, dan peternakan. Pola kerja masyarakat bersifat tradisional dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Nelayan menjadi mata pencaharian utama, dengan aktivitas melaut yang bergantung pada cuaca dan musim. Selain itu, masyarakat juga menjalankan usaha perdagangan kecil, industri rumah tangga, serta jasa transportasi skala lokal.

Ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Raas masih tergolong terbatas. Jaringan jalan darat memiliki panjang sekitar 50 kilometer, namun sebagian kondisinya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Pasokan listrik masih mengandalkan PLTD dengan waktu operasional terbatas, sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, Kecamatan Raas telah memiliki pasar desa dan koperasi sebagai penunjang aktivitas perdagangan, meskipun pemanfaatannya belum optimal.

Gambaran umum wilayah ini menunjukkan bahwa Kecamatan Raas memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar, namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi wilayah menjadi penting sebagai dasar dalam menganalisis peran penduduk, aktivitas ekonomi, dan transportasi laut dalam pengembangan wilayah Kecamatan Raas. Peran Penduduk dalam Pengembangan Wilayah Penduduk merupakan komponen utama dalam pengembangan wilayah karena berperan langsung sebagai pelaku aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Secara konseptual, penduduk adalah individu yang menetap di suatu wilayah dan memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya (Bintarto, 1989). Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk sebagai seluruh Warga Negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan sensus. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat Pulau Raas, peran penduduk dalam pengembangan wilayah terlihat sangat dominan, khususnya dalam sektor ekonomi berbasis sumber daya laut. Mayoritas penduduk Pulau Raas bekerja sebagai nelayan dan pedagang kecil, yang secara langsung menggantungkan penghidupannya pada hasil perikanan tangkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk berperan se-

bagai tenaga kerja utama sekaligus pelaku produksi yang menopang ekonomi lokal wilayah kepulauan. Selain sebagai pelaku produksi, penduduk Pulau Raas juga berperan sebagai konsumen yang memengaruhi dinamika ekonomi lokal. Aktivitas jual beli hasil laut, kebutuhan logistic nelayan, serta konsumsi rumah tangga menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa. Namun, daya beli masyarakat masih relatif terbatas karena pendapatan yang bergantung pada musim dan kondisi cuaca. Hal ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan usaha non-perikanan dan terbatasnya diversifikasi ekonomi wilayah. Penduduk juga berperan sebagai agen perubahan sosial dan pembangunan lokal. Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, kerja sama antarnelayan, dan kegiatan sosial masih cukup kuat, mencerminkan modal sosial yang potensial untuk mendukung pengembangan wilayah. Namun, peran ini belum sepenuhnya dioptimalkan dalam bentuk inovasi ekonomi maupun pengambilan keputusan pembangunan yang berorientasi jangka panjang. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang memengaruhi efektivitas peran penduduk dalam pengembangan wilayah. Meskipun masyarakat Pulau Raas dikenal memiliki etos kerja yang tinggi dan semangat gotong royong yang kuat, tingkat pendidikan dan literasi ekonomi masih relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduk masih bertahan pada sektor primer dan menjual hasil laut dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh masih rendah. Temuan ini sejalan dengan Muhidin dkk. (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya kualitas SDM dapat membatasi inovasi dan memperlambat pertumbuhan wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penduduk di Pulau Raas sebenarnya memiliki potensi besar dalam mendorong pengembangan wilayah, tetapi belum diikuti oleh peningkatan kapasitas dan keterampilan yang memadai. Sejalan dengan Akbar dkk. (2023), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan optimalisasi sumber daya manusia dan alam secara seimbang. Dalam konteks Pulau Raas, hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, pelatihan pengolahan hasil laut,

serta penguatan literasi ekonomi masyarakat pesisir. Pengembangan wilayah kepulauan, sebagaimana dikemukakan oleh Kusnita et al. (2021), menuntut keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan kualitas manusia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan peran penduduk dalam pengembangan wilayah Pulau Raas tidak cukup hanya dengan mengandalkan potensi alam, tetapi harus diikuti oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat mampu menciptakan inovasi dan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.

Aktivitas Ekonomi Lokal

Aktivitas ekonomi merupakan seluruh kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa (Lubis, 2014). Aktivitas ekonomi juga merefleksikan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan dinamika pasar. Dalam konteks pembangunan wilayah, aktivitas ekonomi memiliki peran strategis karena membentuk struktur ekonomi daerah, menentukan tingkat pendapatan masyarakat, serta memengaruhi daya saing suatu wilayah (Simanjuntak dan Widodo, 2025). Pulau Raas sebagai wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep memiliki karakter ekonomi yang khas, yaitu berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut (Waluyo, 2014). Sektor ekonomi utama masyarakat Pulau Raas meliputi perikanan tangkap, perdagangan antar pulau, serta jasa transportasi laut. Pola ekonomi ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor primer, khususnya perikanan, yang sekaligus menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan wilayah. Di satu sisi, ketersediaan sumber daya laut memberikan peluang ekonomi yang besar, namun di sisi lain ketergantungan pada sektor primer membuat perekonomian masyarakat rentan terhadap faktor alam dan fluktuasi pasar.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian besar masyarakat Pulau Raas bekerja sebagai nelayan yang setiap hari melaut untuk menangkap ikan, cumi, teri-

pang, lobster, kepiting, dan berbagai hasil laut lainnya. Hasil tangkapan tersebut umumnya dijual kepada pengepul untuk kemudian didistribusikan ke wilayah Sumenep, Surabaya, Situbondo, hingga Bali. Aktivitas ekonomi nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Ketika angin kencang dan gelombang laut tinggi, aktivitas melaut tidak dapat dilakukan sehingga berdampak langsung pada penurunan pendapatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi masyarakat Pulau Raas masih sangat bergantung pada faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Aktivitas ekonomi masyarakat Pulau Raas memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan wilayah, antara lain melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, terciptanya lapangan kerja di sektor perikanan dan perdagangan, serta pergerakan arus barang antar wilayah.

Namun demikian, aktivitas ekonomi yang masih berfokus pada penjualan bahan mentah tanpa pengolahan lebih lanjut menyebabkan nilai tambah ekonomi yang diperoleh masyarakat relative rendah. Selain itu, apabila pemanfaatan sumber daya laut tidak dikelola secara berkelanjutan, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi, terutama di wilayah pulau kecil seperti Pulau Raas. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan salah satu warga Pulau Raas, Bapak Enden, seorang nelayan yang telah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari laut. Beliau menyampaikan bahwa penghasilan utama berasal dari aktivitas melaut menggunakan perahu milik pribadi, dengan hasil tangkapan yang dijual kepada pengepul di pelabuhan maupun langsung ke rumah pengepul. Namun, beliau juga menegaskan bahwa pendapatan sangat bergantung pada kondisi cuaca, karena ketika cuaca buruk aktivitas melaut tidak dapat dilakukan sehingga penghasilan menurun. Hal ini memperkuat temuan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih bersifat subsisten dan rentan terhadap risiko alam. Jika dibandingkan dengan kawasan Free Trade Zone seperti Batam yang memiliki dukungan kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal (Kusnita et al., 2021), Pulau Raas belum memiliki kawasan ekonomi

husus yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Meskipun demikian, Pulau Raas memiliki potensi besar untuk mengembangkan zona ekonomi berbasis komunitas pesisir yang mandiri, dengan mengoptimalkan peran masyarakat lokal dalam pengolahan hasil laut dan pengembangan usaha bernilai tambah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat pesisir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan usaha lokal agar aktivitas ekonomi Pulau Raas dapat berkembang lebih produktif dan berdaya saing.

Transportasi Laut dan Aksesibilitas

Secara konseptual, transportasi merupakan sistem pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya (Tamin, 2007). Dalam konteks penelitian ini, transportasi yang dimaksud adalah transportasi laut, karena menjadi satu-satunya akses utama masyarakat Pulau Raas untuk terhubung dengan daratan Kabupaten Sumenep, Jangkar, dan wilayah lainnya. Ketergantungan yang tinggi terhadap transportasi laut menjadikan sektor ini sebagai faktor kunci dalam menentukan tingkat aksesibilitas dan perkembangan wilayah Pulau Raas. Peran transportasi sangat vital dalam pengembangan wilayah, terutama di daerah kepulauan. Menurut Nasution (2008), transportasi berfungsi sebagai faktor pengikat antarwilayah yang memperlancar arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk. Kualitas sistem transportasi menentukan tingkat keterjangkauan ekonomi suatu wilayah; semakin baik sarana dan prasarana transportasi, maka semakin besar peluang suatu wilayah untuk berkembang. Dalam konteks wilayah kepulauan, keterbatasan transportasi tidak hanya menghambat distribusi hasil produksi, tetapi juga membatasi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pasar. Seperti halnya pengelolaan pelabuhan di Kepulauan Riau yang diarahkan menjadi konsep City Port, pelabuhan di Pulau Raas juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Pelabuhan Niaga Lokal yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pengembangan tersebut

dapat dilakukan melalui perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan, peningkatan keamanan pelayaran, serta penerapan digitalisasi sistem tiket dan logistik. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta menciptakan sistem transportasi laut yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Di Pulau Raas, transportasi laut menjadi nadi utama kehidupan ekonomi masyarakat. Ketika konektivitas laut terganggu, baik akibat cuaca buruk maupun keterbatasan armada kapal, distribusi hasil tangkapan nelayan dan mobilitas penduduk ikut terhambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut. Oleh karena itu, peningkatan sarana pelabuhan, penambahan frekuensi kapal, serta digitalisasi logistik laut merupakan langkah strategis untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah. Berdasarkan hasil observasi lapangan, transportasi laut di Pulau Raas masih menjadi sarana utama masyarakat untuk bepergian dan mengirim barang. Kapal penumpang dan pengangkut barang umumnya beroperasi menuju Pelabuhan Kalianget di Sumenep dan Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Jawa Timur. Jadwal keberangkatan kapal dilakukan secara bergantian setiap minggu dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pemesanan tiket masih dilakukan secara langsung di pelabuhan, sementara informasi jadwal keberangkatan disebarakan setiap bulan agar Masyarakat dapat menyesuaikan waktu perjalanan.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu nelayan setempat, Bapak Enden, yang menyampaikan bahwa “masyarakat Pulau Raas sangat bergantung pada transportasi laut untuk mendistribusikan hasil tangkapan ke berbagai daerah seperti Sumenep, Surabaya, Situbondo, dan Bali. Beliau juga menegaskan bahwa ketika cuaca buruk, tidak hanya aktivitas melaut yang terhenti, tetapi distribusi barang pun ikut terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan aksesibilitas transportasi laut menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan ekonomi wilayah.” Secara keseluruhan, transportasi laut memegang peran strategis dalam pengembangan wilayah kepulauan (Muammar dan Mosyofa, 2024).

Infrastruktur transportasi yang memadai mampu meningkatkan aksesibilitas ekonomi, mendorong pemerataan pembangunan, menarik investasi, serta memicu transformasi sosial dan tata ruang wilayah. Oleh karena itu, penguatan sistem transportasi laut di Pulau Raas melalui peningkatan sarana dan prasarana, digitalisasi layanan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penduduk memiliki peran sentral dalam pengembangan wilayah Pulau Raas karena berfungsi sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Peran tersebut tercermin dari dominasi masyarakat yang bekerja di sektor perikanan dan perdagangan hasil laut. Meskipun Pulau Raas memiliki potensi sumber daya alam yang besar, pengembangan wilayah belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya nilai tambah ekonomi, serta tingginya ketergantungan pada sektor primer dan kondisi alam. Aktivitas ekonomi masyarakat Pulau Raas masih didominasi oleh penjualan hasil laut dalam bentuk mentah, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan dan pertumbuhan wilayah relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya diversifikasi ekonomi dan pengembangan usaha berbasis pengolahan hasil laut agar tercipta nilai tambah yang lebih tinggi serta ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menjadi prasyarat utama untuk mendorong transformasi ekonomi local yang lebih berkelanjutan.

Transportasi laut memegang peranan strategis sebagai penghubung utama Pulau Raas dengan wilayah lain. Keterbatasan armada, fasilitas pelabuhan, serta ketergantungan terhadap kondisi cuaca masih menjadi hambatan utama dalam distribusi barang dan mobilitas penduduk. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur pelabuhan, penambahan frekuensi kapal, serta penerapan sistem transportasi laut yang lebih terintegrasi dan berbasis digital menjadi kebu-

tuhanmendesak dalam mendukung pengembangan wilayah kepulauan. Secara keseluruhan, pengembangan wilayah Pulau Raas memerlukan sinergi antara penguatan peran penduduk, pengembangan aktivitas ekonomi lokal yang bernilai tambah, dan modernisasi sistem transportasi laut. Dukungan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada masyarakat kepulauan menjadi faktor penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pengembangan wilayah Pulau Raas yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ryan Aldiansyah, Muhammad Fauzan, Andi Asy'hary J Arsyad, dan Khotimatul Barki. 2023. "Implementasi pendekatan community empowerment untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah." *Journal of Sciencetech Research and Development* 5 (1): 65–76.
- Bintarto. (1989). *Interaksi desa–kota dan permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. Kecamatan Raas dalam Angka 2024.
- Kusnita, A., Rahmawati, R., & Putra, D. A. (2021). Peran transportasi laut dalam pengembangan wilayah kepulauan (Studi kasus Kepulauan Riau). *Jurnal Transportasi dan Pembangunan Wilayah*, 9(2), 112–123.
- Asriadi, A., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Paradigma Ekonomi berkelanjutan di Negara Berkembang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1009. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12794>
- Adryawning, V. A., & Widiyanto, D. (2025). Analisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan wilayah di Indonesia. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 210. <https://doi.org/10.20961/region.v20i1.86894>
- Asriadi, A., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Paradigma Ekonomi berkelanjutan di Negara Berkembang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1009. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12794>
- Fuady, A. H. (2012). Perencanaan Pembangunan Di Indonesia Pascaorde Baru: Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat. *Masyarakat Indonesia*, 38(2), 375. https://media.neliti.com/media/publications/152076-ID-perencanaan-pembangunan-di-indonesia-pas.pdf?utm_source
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Yudaruddin, R., Anggraini Bintoro, R. F., Suharsono, Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Public sector innovation in local government and its impact on development outcomes: Empirical evidence in Indonesia. *Heliyon*, 9(12), e22833. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22833>
- Iqbal, M. N. M. (2010). *Perbaikan Permukiman Informal di Indonesia: Refleksi Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*. 37–41. <https://ejournal.itn.ac.id/semsina/article/view/3255/2564>
- Judijanto, L., Ekasari, S., & Elida, S. (2024). Local Economic Development Based on Village Potential: a Literature Review. *Journal of Community Dedication*, 4(2), 414–426.
- Karuniasa, M. (2020). Prinsip-Prinsip Transformasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Dan Pengendalian Perubahan Iklim Berdasarkan Paradigma Systems Thinking. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 14(2), 13–29. <https://doi.org/10.31849/forestra.v14i2.3514>
- Kurniadi, A., Sudarmiatin, & Wardana, L. W. (2024). The Role of MSMES in Local Economic Improvement and Labor Absorption in Indonesia. *Nusantara Economics and Entrepreneurships Journals*, 2(3), 333–341.
- Lestari, F. Y., Affandi, M. I., & Ismono, R. H. (2023). Analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung Tahun 2012-2020. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 456. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.60132>

- Novita, A. A., Shinjee, B., Melinda, D., Sari, T. P., & Tantriana, P. (2023). *Regional Economic Development Based on Local (Study on Gadingkulon Village , Dau District , Malang Regency)* (Vol. 1, Issue 115). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-090-9>
- Pratomo, S., Ashar, K., & Satria, D. (2021). Role of Creative Economy on Local Economic Development. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(2), 27–35. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.009.02.4>
- Puteri, R., & Rani¹, H. (2020). Analisis Paradigma Pembangunan Di Indonesia Analisis of Development Paradigm in Indonesian. *IJI Publication*, 1(1), 40–52. <https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/37>
- Reza Hariyadi, A. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 259–276. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>